

BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Pergub nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Perda nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusda Tenggara Barat .

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - g. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Sekretariat, membawahi :

- Subbagian Program dan Pelaporan;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.

Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan, adalah sebagai berikut:

- menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;

- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas Subbagian Keuangan, adalah sebagai berikut:

- mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- melakukan urusan ketatausahaan;
- melakukan urusan kepegawaian;
- melakukan urusan perlengkapan;
- melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pengembangan perluasan tenaga kerja, pembinaan penempatan antar kerja daerah, antar kerja antar negara, penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, dan pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja;
- b. pelaksanaan penganalisaan jabatan dan pengklarifikasian jabatan serta pedoman bimbingan jabatan;
- c. pengembangan usaha mandiri sistem padat karya, teknologi tepat guna dan perluasan sektor informal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :

- Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
- Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri;
- Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

- a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyusun sistem dan pedoman serta melakukan pembinaan terhadap informasi pasar kerja.

Rincian tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :

- menyusun sistem dan pedoman pembinaan pasar kerja;
- melaksanakan kunjungan dalam rangka pengumpulan data kerja di kabupaten/kota;
- menyiapkan penyusunan sistem dan pedoman bursa kerja di lembaga pendidikan formal dan lembaga pelatihan kerja;
- melaksanakan penyebarluasan buku berita pasar kerja ke instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pelatihan dan pengembangan perluasan

tenaga kerja, pembinaan penempatan antar kerja daerah, antar kerja antar negara, pembinaan bimbingan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, adalah sebagai berikut :

- melaksanakan dan menyiapkan bahan atau materi pelatihan, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
- menganalisis hasil olahan dan tenaga kerja mandiri untuk didistribusikan kembali kepada dinas kabupaten/kota agar mengetahui perkembangan atas hasil yang telah dicapai;
- memberikan penyuluhan dan pembinaan usaha mandiri melalui kelompok kerja dan dari rumah ke rumah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga menambah kemampuan dan pengembangan usaha;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya mempunyai tugas mengembangkan usaha mandiri sistem padat karya, teknologi tepat guna dan perluasan areal.

Rincian tugas Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya, adalah sebagai berikut :

- menyusun bahan pembinaan tentang teknologi tepat guna dan padat karya;
- melaksanakan pengawasan teknologi tepat guna dan padat karya;
- menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pengembangan perluasan tenaga kerja, pasar kerja, pelaksanaan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- b. pembinaan program akreditasi, standarisasi dan sertifikasi;
- c. pembinaan struktur dan peralatan kerja;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :

- Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;
- Seksi Pemagangan;
- Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- a. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan instruktur dan kelembagaan.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan, adalah sebagai berikut :

- menyusun bahan pembinaan tentang instruktur dan kelembagaan;
- melaksanakan pengawasan dan pembinaan instruktur dan kelembagaan;
- menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Pemagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tentang pemagangan tenaga kerja.

Rincian tugas Seksi Pemagangan, adalah sebagai berikut :

- menyusun bahan pembinaan tentang pemagangan;
- melaksanakan pengawasan pemagangan;
- menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan sertifikasi dan pembinaan bimbingan produktivitas tenaga kerja.

Rincian tugas Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :

- menyusun bahan pembinaan tentang sertifikasi produktivitas tenaga kerja;
- melaksanakan pengawasan sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga kerja;
- menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga kerja;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan penempatan pedoman dan pembinaan kesejahteraan purnakerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan menghimpun, merumuskan dan menetapkan pedoman kesejahteraan purnakerja;
- b. pelaksanaan inventarisasi jumlah purnakerja akibat perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kecelakaan kerja diperusahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pelatihan bagi purnakerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- d. pelaksanaan pelatihan dan pemberian rekomendasi bagi purnakerja, peserta jamsostek yang terkena PHK untuk memperoleh bantuan PHK dari PT. Jamsostek;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :

- Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan;
- Seksi Norma Kerja;
- Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

a. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan mempunyai tugas membina hubungan industrial yang kondusif di perusahaan.

Rincian tugas Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, adalah sebagai berikut :

- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan/penyuluhan hubungan industrial;
- menyusun bahan pelatihan/bimbingan teknis bagi pekerja dan pengusaha;
- melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi pekerja dan pengusaha tentang juru runding, hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kinerja mediator pegawai perantara hubungan industrial dan kabupaten/kota.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan norma umum dan norma khusus serta pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan pada kabupaten/kota.

Rincian tugas Seksi Norma Kerja, adalah sebagai berikut :

- menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma ketenagakerjaan;
- melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi : pengawasan upah, perlindungan jamsostek, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat;
- menyusun bahan inventarisasi data ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
- menyiapkan dan menyusun bahan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah sebagai berikut :

- menyusun bahan pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;
- melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan perundang-undangan;
- memberikan pengesahan pemakaian penggunaan: pesawat uap, pesawat angkat angkut, motor diesel, instalasi listrik, dan penyalur petir;
- menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM, perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan, pengembangan usaha produktif, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dan penyiapan proses pengakhiran status UPT.

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat serta perencanaan penyerasian pengembangan kawasan;
- b. fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha produktif dan kawasan transmigrasi;
- c. fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi.

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, membawahi :

- Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat;
- Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan;
- Seksi Sarana dan Prasarana.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat. Rincian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat, adalah sebagai berikut :
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat;
 - fasilitasi dan koordinasi penyerasian rencana pengembangan masyarakat dan kawasan;
 - bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kapasitas SDM dan masyarakat;
 - pemantauan, evaluasi dan pengukuran tingkat perkembangan unit permukiman transmigrasi;
 - penyiapan usulan pengakhiran status UPT.
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan usaha dan kawasan transmigrasi. Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan, adalah sebagai berikut :
- sinkronisasi dan penyusunan rencana pengembangan usaha masyarakat transmigrasi;
 - koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat transmigran;
 - fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan usaha produktif masyarakat transmigran;
 - koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi perkembangan UPT.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan koordinasi, fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana permukiman. Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana, adalah sebagai berikut :
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana permukiman;

- koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi;
- fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan penyerasian lingkungan dan permukiman transmigrasi.

(7) Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi penyediaan areal, pembangunan permukiman, pengarahannya, pemindahan dan penempatan transmigrasi serta publikasi, promosi dan kemitraan bidang ketransmigrasian.

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a) fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan dan permukiman dan penyediaan areal;
- b) fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi rencana teknis pengarahannya, perpindahan dan penempatan transmigrasi;
- c) fasilitasi, koordinasi dan penyiapan bahan publikasi, promosi, pelayanan investasi dan kemitraan.

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahi :

- Seksi Penyediaan Areal dan Permukiman;
- Seksi Perpindahan dan Penempatan;
- Seksi Publikasi dan Kemitraan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.

- a. Seksi Penyediaan Areal dan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan supervisi kegiatan penyediaan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi;

Rincian tugas Seksi Penyediaan Areal dan Permukiman, adalah sebagai berikut :

- perumusan kebijakan rencana teknis pembangunan permukiman transmigrasi;
- penyusunan bahan usulan rencana pembangunan lokasi permukiman transmigrasi;
- fasilitasi dan koordinasi penyediaan areal permukiman transmigrasi;
- koordinasi, pengendalian dan supervisi pelaksanaan penyiapan, permukiman dan penempatan transmigrasi.

b. Seksi Perpindahan dan Penempatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan supervisi kegiatan perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Rincian tugas Seksi Perpindahan dan Penempatan, adalah sebagai berikut :

- perumusan kebijakan rencana teknis pengarahannya, perpindahan dan penempatan transmigrasi;
- penyiapan bahan usulan dan koordinasi rencana pengarahannya, pemindahan dan penempatan transmigrasi;
- koordinasi pelaksanaan penyiapan seksi calon transmigrasi;
- fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi.

c. Seksi Publikasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan kegiatan publikasi, promosi dan kemitraan.

Rincian tugas Seksi Publikasi dan Kemitraan, adalah sebagai berikut :

- penyiapan bahan publikasi dan pelaksanaan KIE bidang ketransmigrasian;
- mediasi kerjasama antar daerah dalam rangka perpindahan dan penempatan transmigrasi;
- penyediaan informasi dan promosi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi (WPT);
- mediasi dan koordinasi peranan investasi dalam rangka pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT).

2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasional Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdayaguna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 23 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Pembentukan UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram;
- UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD);
- UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja;
- UPTD Balai Latihan Transmigrasi.

1) UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan kebijakan teknis latihan kerja, pengkajian dan analisis latihan kerja, pemantauan dan pengendalian latihan kerja.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program latihan kerja;
- b. pengkajian dan analisis teknis latihan kerja;
- c. pengujian dan penerapan program latihan kerja yang sudah disempurnakan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis latihan kerja;
- e. penyelenggaraan program latihan kerja;
- f. pemantauan dan pengendalian latihan kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Latihan Kerja;
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)

Mataram sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan.

- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram.
 - (3) Seksi Penyelenggaraan Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana/program; menyiapkan bahan penyusunan sertifikasi; melaksanakan pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Penyelenggaraan Latihan Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana/program; melaksanakan pemantauan hasil latihan kerja; melaksanakan pengawasan uji keterampilan; melaksanakan penilaian penentuan kelulusan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat .
- UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan rencana dan program pengembangan produktivitas tenaga kerja, pengkajian dan analisis teknis penyelenggaraan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja, pemantauan dan pengendalian latihan kerja.
- Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - b. pengkajian dan analisis teknis penyelenggaraan produktivitas tenaga kerja;
 - c. pengujian dan penerapan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- e. penyelenggaraan program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- f. pemantauan dan pengendalian program pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD), terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD).
 - (3) Seksi Pengkajian Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; mengkaji dan menganalisis kebijakan teknis operasional pengembangan produktivitas tenaga kerja; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; melaksanakan fasilitasi teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pengkajian Produktivitas Tenaga Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (4) Seksi Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja, pelaksanaan dan penerapan kebijakan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelatihan dan pengujian di bidang hygine perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan fasilitas laboratorium.
- Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program hygine perusahaan dan keselamatan kerja;
 - b. penyusunan rencana pelatihan dan pengujian hygine perusahaan dan keselamatan kerja;
 - c. pelatihan, pemberian layanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang
 - d. hygine perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan;
 - e. penyelidikan dan pengujian di bidang hygine perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - f. pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan dan pengujian hygineperusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. pemantauan dan pengendalian program hygine perusahaan dan keselamatan kerja;
 - h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- Susunan Organisasi UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan dan Pengujian;
 - d. Seksi Pemasaran dan Kerjasama;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan

pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja.

- (3) Seksi Pelatihan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan pelatihan, melakukan usaha-usaha pengembangan tenaga hygiene perusahaan dan keselamatan kerja melalui seminar dan penyuluhan; melakukan pengkajian, pengujian dan analisis di bidang pelatihan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pelatihan dan Pengujian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (4) Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan pemasaran dan kerjasama dengan lembaga lain terkait, menyediakan data dan informasi dalam rangka promosi pemasaran di bidang pemasaran dan kerjasama; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Hygine Perusahaan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 4) UPTD Balai Latihan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- UPTD Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan rencana/program pendidikan dan pelatihan transmigrasi, pengkajian dan analisis teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan transmigrasi, pemantauan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan transmigrasi.
- Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Latihan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigrasi dan
 - b. transmigrasi;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan pelatihan bagi calon transmigrasi dan
 - d. transmigrasi;
 - e. penyiapan evaluasi, monitoring dan bimbingan pasca pelatihan;
 - f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan;
- d. Seksi Rencana dan Evaluasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Latihan Transmigrasi.
 - (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan pelatihan; melakukan usaha-usaha pengembangan keterampilan bagi calon transmigran dan transmigrasi; melakukan pengkajian di bidang pelatihan transmigrasi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pelatihan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (4) Seksi Rencana dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Rencana dan Evaluasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Latihan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

D. KONDISI AKTUAL

1. Kondisi Internal

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur (SDM) aparatur di lingkungan Dinas dan UPTD, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris. Jumlah seluruh personil di lingkup dinas sebanyak 239 orang, terdiri atas 156 orang laki-laki dan 83 orang perempuan yang tersebar di sekretariat, bidang-bidang penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan kawasan transmigrasi, persiapan permukiman dan penempatan transmigrasi, dan unit-unit pelaksana teknis dinas. Personil-personil tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan SD : 8

orang, SLTP: 8 orang, SLTA: 69 orang, Sarjana Muda/DIII: 12 orang, S1: 87 orang, S2: 16 orang; didukung pula oleh Pegawai Honorer Daerah yang berjumlah 4 orang dan Honor Lepas yang berjumlah 35 Orang.

- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 21 Tahun 2008, tanggal 26 agustus 2008;
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baik;
- Tersedia sarana dan prasarana yang guna mendukung kegiatan kedinasan; Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif pemerintahan dan pelayanan masyarakat terdiri atas :
 - ✓ Barang tidak bergerak berupa tanah, bangunan gedung berjumlah 45 buah / persil.
 - ✓ Barang bergerak berupa kendaraan roda empat sejumlah 18 buah dan kendaraan roda dua sejumlah 97 buah.
 - ✓ Barang elektronik, listrik dan mekanik berupa komputer, laptop, mesin ketik dan lain lain.
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. *Kondisi Eksternal*

Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mencakup:

- Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 4.630.302 jiwa, terdiri atas 2.244.721 jiwa laki-laki dan 2.385.581 jiwa perempuan, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Hal tersebut menggambarkan tingkat pengangguran terbuka yang dialami oleh perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.
- Terjadinya transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) yang tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan. Pertumbuhan sektor sekunder dan tersier tidak diimbangi oleh kualitas tenaga kerja yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
- Ketimpangan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum optimal dan pembangunan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani dari aspek ketenagakerjaan dan ketransmigrasian:

- Iklim ketenagakerjaan belum dikelola dengan baik.
- Pembangunan antarwilayah masih mengalami kesenjangan. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan kerja baik lokal, regional maupun luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja yang profesional, mandiri, beretos kerja tinggi, produktif dan disiplin. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan juga diarahkan pada pembangunan bursa tenaga kerja yang terpadu baik pemerintah maupun swasta serta memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), serta Lembaga Latihan Swasta (LLS) guna memenuhi tenaga kerja trampil baik dalam maupun luar negeri, juga perlindungan tenaga kerja diletakkan pada / kesadaran hukum dan kewajiban tenaga kerja (hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha).

E. Analisa SWOT

Prediksi keadaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat secara menajerial menurut teori SWOT (*Strength Weakness Opportunities Threats*) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*) :

- Tersedianya SDM yang memadai;
- Adanya struktur organisasi yang terpol;
- Adanya Layanan Terpadu satu Pintu (LTSP) dengan ruang lingkup Angkatan Kerja, Bursa Kerja (Informasi), Penempatan dan Perlindungan TKI;
- Adanya mediasi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Program Ketransmigrasian di Provinsi NTB Memiliki fungsi ganda yaitu :
 - (1) Sebagai Daerah Asal Transmigran melaksanakan Pengerahan dan Pemindahan transmigran keluar Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Presiden RI. nomor : 1 Tahun 1973.
 - (2) Sebagai Daerah Transmigrasi melaksanakan kegiatan Penyiapan Permukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor:54 Tahun 1992.
- Adanya koordinasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat staf;
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat sektor.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang/Kesempatan (*Opportunities*)

- Peningkatan pengetahuan melalui diklat/pelatihan Pembangunan Balai Latihan Kerja Internasional di Kabupaten Lombok Timur Menuju Tenaga Kerja Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera;
- Di buka pemagangan ke Jepang;
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi;
- Perlu adanya sosialisasi alih tehnologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program dan kegiatan.
- Adanya Rakor-rakor baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat;
- Adanya Kerjasama Antar Daerah, Anter Kerja Antar daerah, Antar Kerja Antar Negara dll;
- Adanya KTM dengan indikator :
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat/ transmigran dari kegiatan pertanian berbasis komoditas unggulan;
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha; berupa kegiatan agribisnis, termasuk usaha-usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil pertanian, jasa pelayanan dll yg dapat meningkatkan daya tarik Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);
 - Meningkatkan fungsi infrastruktur fisik berupa jalan, telekomunikasi, listrik, sarana air bersih dan irigasi;
 - Meningkatkan fasilitas dan pelayanan sosial budaya;
 - Meningkatnya produktivitas masyarakat;
 - Meningkatkan investasi untuk kegiatan agrobisnis dan PAD;
 - Struktur tata ruang kawasan bewawasan lingkungan.

b. Ancaman (*Threats*)

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kompetensi tenaga kerja;
- Iklim ketenagakerjaan belum dikelola dengan baik;
- Pembangunan antarwilayah masih mengalami kesenjangan. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan kerja baik lokal, regional maupun luar negeri;
- Permasalahan yang umumnya terjadi dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah Upah Minimum Kabupaten (UMK), penerapan/penyaluran UMK dari perusahaan kepada pekerja, tidak sesuai dengan UMK, serta pemberian ijin PPTKIS yang tidak sesuai ketentuan, ijin pemanfaatan lahan untuk pertambangan, café dan perkebunan sehingga menimbulkan rawan konflik antara warga masyarakat, pekerja, perusahaan dan pemerintah kab/kota ataupun provinsi;
- Sehubungan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Proses penempatan di luar negeri, Proses penempatan dimaula dari Pra penempatan, penempatan dan purna penempatan, maka :
 - Pada Proses pra penempatan system rekrutmen dan seleksi sangat lemah terutama terkait dengan penyediaan calon TKI yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Kebiasaan yang terjadi bahwa PJTKI, PPTKIS mencari dan memproses sendiri calon TKI lalu menyerahkan administrasi pada Dinas setempat sementara mekanisme yang seharusnya adalah Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota sebagai pusat informasi persediaan tenaga kerja dan lowongan ketenakerjaan mampu menjalankan perannya sehingga dapat menggelincirkan persoalan-persoalan TKI ilegal yang banyak terjadi.
 - Pada proses penempatan fungsi pengawasan pemerintah terhadap perlindungan Tenaga Kerja di Luar negeri dibatasi oleh kewenangannya seperti Undang Undang, dimana pengawasan dan perlindungan TKI dilakukan oleh Kemenlu
 - Kemudian pada proses purna penempatan belum optimalnya pemerintah melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap potensi sumber daya pembiayaan yang dimiliki oleh TKI purnakerja agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui usaha ekonomi kreatif, dan saat ini kecenderungannya TKI purna tidak punya pilihan lain kecuali menjadi TKI lagi.
- Masih ada Kabupaten/Kota yang belum membentuk Dewan Pengupahan, lembaga tripartit sehingga diharapkan segera membentuk dewan pengupahan,

lembaga tripartit sebagaimana ketentuan dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan serta kelangsungan usaha diantara pekerja dan pengusaha.

- Masih kurangnya fungsional pengawas dan mediator ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Untuk itu pihak Kabupaten/Kota mengharapkan adanya mediasi dari pihak Pemerintah Provinsi dalam hal pelatihan teknis fungsional dimaksud.
- Masih terjadinya transmigran ulang alik, diharapkan pada saat seleksi baik di Tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi diharapkan lebih selektif;
- Permasalahan yang rawan menimbulkan konflik dengan penduduk setempat di permukiman transmigrasi adalah permasalahan lahan;
- Adanya permasalahan kesiapan lokasi di daerah transmigrasi yang belum memenuhi kriteria Clear and Clean khususnya pada lahan usaha;
- Semakin terbatasnya calon lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria Clear dan Clean;
- Alokasi Target Pengerahan dan Pemindahan Transmigran relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah animo masyarakat untuk bertransmigrasi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya intensitas koordinasi dengan Daerah Transmigrasi untuk melakukan Kerjasama Antar Daerah.
- Sebagian besar Animo Transmigrasi berminat ke Pulau Sumbawa sementara ketersediaan areal lokasi semakin terbatas.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

Hasil-Hasil Yang Dicapai Tahun 2014

I. KETENAGAKERJAAN

a. *Tenaga Kerja Asing (TKA)*

Jumlah TKA yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB sebanyak 78 orang. Masing-masing bekerja pada Sektor Jasa sebanyak 24 orang, Sektor Bangunan sebanyak 9 orang, Sektor Perdagangan sebanyak 12 orang, Sektor Angkutan sebanyak 23 orang, Sektor Keuangan sebanyak 4 orang, Sektor Pertambangan sebanyak 5 orang dan Sektor Industri sebanyak 1 orang.

b. *Antar Kerja Antar Negara (AKAN)*

Perkembangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui LTSP sebagai berikut :

1. *Penempatan*

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri mencapai 46. 187 orang, terdiri dari Laki-laki 36.219 Orang dan Perempuan 9.968 orang.

Sebagai gambaran bahwa 2 tahun terakhir jumlah pengiriman TKI perempuan (TKW) menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena diberlakukannya moratorium pengiriman PLRT ke luar negeri (khususnya Saudi Arabia), yang diawali oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. *PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta).*

Upaya pembinaan dan penertiban PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTB terus dilakukan secara koordinatif bersama BP3TKI, Kepolisian Daerah NTB, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan unit terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Penanganan TKI yang berpedoman antara lain pada Pergub. Nomor 2 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap PPTKIS yang nakal/kurang bertanggung jawab (*mengalihkan negara tujuan, memalsukan dokumen, mengabaikan TKI dan lain-lain*) dibekukan aktifitasnya. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah PPTKIS yang mampu bertahan semakin menurun sebanyak 235 PPTKIS

3. *TKI Deportasi*

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan terhadap TKI melalui LTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pemulangan TKI Deportasi, baik yang berasal dari Malaysia maupun Timur Tengah.

a. *TKI Deportasi Malaysia*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memberikan pelayanan untuk mengantar TKI Deportasi Malaysia hingga alamat tempat tinggalnya. sebanyak 3.130 orang.

b. *TKI Deportasi Timur Tengah*

Untuk TKI Deportasi Timur Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan BNP2TKI dan BP3TKI yang telah bekerja sama dengan PO. Bus Safari Dharma Raya dan pihak Kepolisian untuk memulangkan ke alamat masing-masing. Terhadap TKI/TKW yang sakit sudah dijalin kerja sama dengan RS. Bhayangkara Polda NTB.

Melalui forum satgas juga dijalin kerjasama dengan dinas sosial kependudukan dan Catatan Sipil NTB, menyiapkan shelter bagi TKI/TKW deportasi yang membutuhkan penampungan sementara.

c. *Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)*

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dapat terealisasi sebanyak 3.059 orang yang dikirim ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra..

d. *Remitansi*

Remitansi atau Pengiriman uang TKI yang dikirim ke tanah air khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik yang dikirim melalui BI dan Pos selama tahun 2014 sebesar Rp. 292.942.107.658,17 yang ditempatkan di Negara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordan, Korea, Malaysia, Brunei, Filipina, Hongkong, Jepang/Tokyo, Singapura dan Negara lain.

Remitansi TKI tertinggi berasal dari tenaga kerja yang bekerja di Saudi Arabia.

e. *Pelatihan*

Program yang dilakukan dalam upaya mematchingkan tuntutan pasar kerja dengan keterampilan tenaga kerja (*link and match*) di NTB antara lain dengan mengoptimalkan fungsi BLK/LLK/KLK baik milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai mitra kerja pemerintah, dengan menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja dengan jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih mencapai 1.968 orang terdiri atas :

- BLK/LLK/KLK Pemerintah : 576 orang
- LPKS : 1.120 orang
- Pemagangan Dalam Negeri : 200 orang
- Pemagangan Luar Negeri : 32 orang
- BLK Internasional : 40 orang

Jenis kompetensi yang dilatih antara lain sebagai berikut ; *processing, menjahit, teknik pendingin, sepeda motor, komputer, perhotelan, mobil, instalasi penerangan, elektronika, bangunan kayu, baja ringan, teknisi tv, teknisi hp, meubeleur, las, tata rias dan bahasa asing.* Baik melalui dana APBN, APBD maupun Swadana dengan rincian sebagai berikut :

- BLK Mataram sebanyak 160 orang
- LLK Selong sebanyak 128 orang
- BLK Praya sebanyak 128 orang
- LLK Bima sebanyak 96 orang
- LLK Sumbawa sebanyak 64 orang
- KSB sebanyak - orang
- LPKS sebanyak 1.120 orang
- Pemagangan sebanyak 200 orang

f. Hubungan Industrial

1. Penyelesaian Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan dalam hal perundingan Bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak melaporkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Jumlah perselisihan yang masuk ke Disnakertrans Provinsi NTB sebanyak 45 kasus dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 188 orang. Dari kasus yang masuk, yang ditangani oleh mediator dapat diselesaikan sebagai berikut :

- Persetujuan bersama di tingkat Bipartit : 1 kasus
- Persetujuan bersama di tingkat Mediasi : 6 kasus
- Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator : 4 kasus
- Masih dalam proses : 34 kasus

2. Outsourcing

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang isinya menetapkan 5 jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi :

- Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),
- Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering),
- Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan),
- Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan
- Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

II. KETRANSMIGRASIAN

1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran

Program pemindahan transmigrasi Prov. NTB dialokasikan sebanyak 94 KK, equivalen 608 jiwa, dengan sebaran penempatan di dalam dan di luar Provinsi NTB masing-masing sebagai berikut :

a. Dalam Provinsi NTB sebanyak 75 KK = 304 Jiwa dengan rincian sebagai berikut

Kab. Bima,

UPT. Sori Panihi SP.6 75 KK = 304 Jiwa

b. Luar Provinsi NTB sebanyak 19 KK, 74 Jiwa masing-masing :

✓ Kalimantan Barat

• Kab. Kayong Utara

- Permukiman Satai Lestari 9 KK = 34 Jiwa

✓ Sulawesi Tenggara

• Kab. Konawe Utara

- Permukiman Padalere 10 KK = 40 Jiwa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

B. INDIKATOR SASARAN

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

C. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan dengan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan rencana tindak (*action play*) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
8. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
11. Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi

BAB IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN

Indikator Pengukuran kinerja yang digunakan antaralain :

1. Indikator masukan (*Inputs*) : Jumlah dana dan jenis masukan yang akan digunakan dalam kegiatan.
2. Indikator keluaran (*Outputs*) : Hasil spesifik yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dirinci pada baris 1: yaitu mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator hasil (*Outcomes*) : Uraikan dengan singkat motivasi atau latar belakang proyek memproduksi keluaran. Bila keluaran sudah diproduksi, fungsi langsung apa yang diharapkan dari keluaran.
4. Indikator manfaat (*Benefit*) : Sebutkan harapan yang ingin dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi seperti diuraikan dalam indikator hasil.
5. Indikator sasaran dan dampak (*Impact*) : Jelaskan dasar pemikiran, latar belakang dan alasan diproduksinya keluaran untuk tujuan yang paling tinggi, sasaran sektoral, daerah atau nasional.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 30.250.000
Outputs : Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes : Kegiatan administrasi Kantor berjalan dengan baik
Benefit : Memperlancar kegiatan administrasi kantor sehari-hari
Impact : Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik

2) Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 304.700.000
Outputs : Terbayarnya jasa fasilitas kantor
Outcomes : Terpenuhinya fasilitas kantor dengan baik
Benefit : Kelancaran kegiatan kantor sehari-hari
Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan lancar

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 204.050.000
Outputs : Perijinan kendaraan dinas dan pemeliharaannya dapat berjalan baik
Outcomes : Kondisi kendaraan dinas tetap baik

- Benefit* : Kelancaran kegiatan kantor sehari-hari
Impact : Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik dan lancar
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Inputs : APBD 2013 Rp. 105.600.000
Outputs : Terbayarnya jasa administrasi keuangan
Outcomes : Kelancaran pengurusan masalah keuangan
Benefit : Terselenggaranya kegiatan yang terkait dengan keuangan
Impact : Kelancaran kegiatan kantor dengan baik
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Inputs : APBD 2016 Rp. 236.500.000
Outputs : Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor
Outcomes : Terciptanya kebersihan kantor
Benefit : Terwujudnya kenyamanan bekerja
Impact : Suasana kerja yang tertib dan lancar
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
Inputs : APBD 2016 Rp. 86.350.000
Outputs : Terbelinya Alat Tulis Kantor
Outcomes : Terwujudnya persediaan Alat Tulis kantor
Benefit : Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik
Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan lancar
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Inputs : APBD 2016 Rp. 106.975.000
Outputs : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Dinas
Outcomes : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Dinas
Benefit : Memperlancar Kegiatan Kantor Dinas
Impact : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Dinas

- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 55.000.000
- Outputs* : Tersedianya sarana penerangan
- Outcomes* : Ruang Kerja lebih representatif
- Benefit* : Memperlancar kegiatan Administrasi kantor
- Impact* : Tercapainya Proses Pelaksanaan Kegiatan dengan lancar
- 10) Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 39.600.000
- Outputs* : Tersedianya Informasi Menunjang Kegiatan Dinas
- Outcomes* : Terpenuhinya Informasi Penunjang Kegiatan Dinas
- Benefit* : Meningkatkan Pemahaman aparatur
- Impact* : Tercapainya SDM aparatur yang berkualitas
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 71.500.000
- Outputs* : Terlaksannaya penyediaan makan Minum Kantor
- Outcomes* : Makan Minum Kantor, Tamu Rapat dll
- Benefit* : Terwujudnya kelancaran koordinasi kegiatan
- Impact* : Kegiatan lebih efektif dan efisien di lingkup Dinas
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 214.500.000
- Outputs* : Terlaksannaya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
- Outcomes* : Terkondisinya Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- Benefit* : Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
- Impact* : Memperoleh target Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai Program
- 13) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 129.030.000
- Outputs* : Tersedianya jasa pegawai non PNS
- Outcomes* : Membantu kelancaran kegiatan kantor

Benefit : Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik dan lancar

Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan lancar

14) Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Inputs : APBD 2016 Rp. 198.000.000

Outputs : Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah

Outcomes : Terkondisinya Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Benefit : Terkoordinasi dan Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

Impact : Memperoleh target Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sesuai Program

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan gedung kantor

Inputs : APBD 2016 Rp. 190.300.000

Outputs : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung

Outcomes : Tersedianya Perencanaan Gedung

Benefit : Terbangunan Gedung

Impact : Pelayanan Terhadap Masyarakat lebih optimal

2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Inputs : APBD 2016 Rp. 389.694.000

Outputs :

- Terlaksananya kamera digital
- Terlaksananya Pengadaan AC
- Terlaksananya Pengadaan Printer
- Terlaksananya Pengadaan UPS dan Stavol
- Terlaksananya Pengadaan Almari
- Terlaksananya Pengadaan Komputer
- Terlaksananya Pengadaan Laptop
- Terlaksananya Pengadaan CCTV
- Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor
- Terlaksananya Pengadaan Lensa Kamera

Outcomes : Tersedianya Perlengkapan Gedung

- Benefit* : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor
Impact : Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Gedung Dinas dan UPTD di Lingkup Disnakertrans NTB
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Inputs : APBD 2016 Rp. 363.000.000
Outputs : Terpeliharanya sarana Gedung Kantor
Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik
Benefit : Gedung Kantor Lebih asri
Impact : Sarana dan lebih aman dan terjaga dengan baik
- 4) Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Inputs : APBD 2016 Rp. 60.500.000
Outputs : Terlaksananya Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan kantor
Outcomes : Tercapainya Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan kantor
Benefit : Peralatan Kantor lebih siap untuk digunakan dan lebih awet
Impact : Kegiatan Perkantoran akan lebih dinamis
- 5) Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)
Inputs : APBD 2016 Rp. 27.500.000
Outputs : Pemeliharaan Arsip
Outcomes : Terpeliharanya Sarana Penujang kearsipan
Benefit : Tertatanya kearsipan dengan baik
Impact : Mudahnya pencarian arsip
3. Program peningkatan disiplin aparatur
- 1) Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Inputs : APBD 2016 Rp. 33.000.000
Outputs : Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Outcomes : Meningkatnya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur di Lingkup Disnakertrans
Benefit : Menghasilkan SDM yang Produktif dan Berdaya saing

Impact : Terwujudnya SDM yang Produktif dan Berdaya saing

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan pelatihan formal

Inputs : APBD 2016 Rp. 60.500.000

Outputs : Tersedianya biaya untuk mendukung pengembangan SDM

Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian PNS

Benefit : Meningkatnya kemampuan dan wawasan PNS

Impact : Meningkatnya kualitas SDM

2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian

Inputs : APBD 2016 Rp. 41.800.000

Outputs : Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

Outcomes : Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

Benefit : Terbentuknya aparatur yang disiplin

Impact : Menghasilkan SDM yang Produktif dan Berdaya saing

3) Penilaian Kinerja SKPD

Inputs : APBD 2016 Rp. 68.200.000

Outputs : Terlaksananya Penilaian SKPD

Outcomes : Terwujudnya Penilaian SKPD

Benefit : Terbentuknya aparatur yang memiliki kinerja yang baik

Impact : Menghasilkan SDM yang Produktif dan Berdaya saing

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Inputs : APBD 2016 Rp. 82.500.000

Outputs : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Outcomes* : Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Benefit* : Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Impact* : Terukurnya capaian kinerja Dinas
- 2) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 25.300.000
- Outputs* : Terlaksannya Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi Anggaran
- Outcomes* : Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi Anggaran
- Benefit* : Tersusunya Pelaporan Prognosis realisasi Anggaran
- Impact* : Terdatanya realisasi Anggaran
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 24.750.000
- Outputs* : Terlaksananya Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Outcomes* : Terpenuhinya Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Benefit* : Tersusunya pelaporan akhir tahun
- Impact* : Terdatanya pelaporan akhir tahun
- 4) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 79.200.000
- Outputs* : Terlaksannya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
- Outcomes* : Terpenuhinya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
- Benefit* : Tercapainya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan
- Impact* : Tercapainya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 63.800.000
- Outputs* : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas (triwulan dan Tahunan)

Outcomes : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulann dan Tahunan

Benefit : Terkendalinya kegiatan dinas

Impact : Meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan

6) Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

Inputs : APBD 2016 Rp. 357.500.000

Outputs : Terlaksannanya Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (SIMNAKERTRANS)

Outcomes : Tercapainya informasi yang tepat dan akurat

Benefit : Masyarakat dan para pengambil kebijakan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan

Impact : Peningkatan simnakertrans

6. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Inputs : APBD 2016 Rp. 79.750.000

Outputs : Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Negara

Outcomes : Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Negara

Benefit : Menghasilkan SDM aparatur yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Impact : Terwujudnya SDM yang Produktif dan Berdaya saing dalam pengelolaan keuangan.

2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Inputs : APBD 2016 Rp. 79.750.000

Outputs : Terlaksananya Pembinaan Keuangan dan Stakeholder di lingkungan Disnakertrans

Outcomes : Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Negara

Benefit : Menghasilkan SDM yang Produktif dan Berdaya saing

Impact : -

7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1) Mediasi Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 269.500.000

Outputs : Terlaksananya Koordinasi / Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Ketenagakerjaan.

Outcomes : Mengurangi Pengangguran

Benefit : Tersaringnya Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

Impact : Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja

2) Sosialisasi Pemagangan dalam dan luar negeri

Inputs : APBD 2016 Rp. 30.250.000

Outputs : Terselenggaranya Sosialisasi Pemagangan dalam dan Luar Negeri

Outcomes : Terpahaminya Pemagangan oleh para Stakeholder

Benefit : Masyarakat/Calon Tenaga Kerja/TKI memperoleh informasi yang tepat

Impact : Mengurangi Pengangguran

3) Rekrutment dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri (Jepang)

Inputs : APBD 2016 Rp. 104.967.500

Outputs : Terselenggaranya rekrutmen Pemagangan Luar Negeri (Jepang)

Outcomes : Terealisir Calon Tenaga Kerja/TKI dalam proses Pemagangan

Benefit : Terkirimnya Tenaga Kerja ke Jepang

Impact : Mengurangi pengangguran

4) Singkronisasi Kebutuhan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 61.710.000

Outputs : Terselenggaranya Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Outcomes : Tersusunnya Kebutuhan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Benefit* : Terlaksannya Pelatihan PBK sesuai kebutuhan pasar kerja
- Impact* : Menghasilkan Tenaga Kerja yang siap pakai dan kompeten
- 5) Pembinaan, Koordinasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 266.200.000
- Outputs* : Terselenggaranya Pembinaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
- Outcomes* : Terpahaminya Standar Kompetensi Pelatihan
- Benefit* : Pejabat/Pegawai/Stakeholder tentang PBK
- Impact* : Meningkatkan Daya saing Tenaga Kerja
- 6) Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 121.000.000
- Outputs* : Terselenggaranya Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
- Outcomes* : Tercapainya Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang terakreditasi
- Benefit* : Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berkualitas
- Impact* : Menghasilkan Tenaga Kerja yang siap pakai dan kompeten
- 7) Pembentukan Desa Produktif
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 121.000.000
- Outputs* : Terlaksannya Pembentukan Desa Produktif
- Outcomes* : Terwujudnya peningkatan produktivitas
- Benefit* : Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa
- Impact* : Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat meningkat
- 8) Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competiton (5 kejuruan = 50 Orang)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 319.000.000

- Outputs* : Terlaksananya Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition
- Outcomes* : Terwujudnya tenaga kerja trampil
- Benefit* : Terciptanya peningkatan daya saing
- Impact* : Mnegurangi pengangguran
- 9) Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 27.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)
- Outcomes* : Terwujudnya tenaga kerja trampil
- Benefit* : Terciptanya lapangan kerja
- Impact* : Tercapainya LPK yang memadai dan profesional
- 10) Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 715.000.000
- Outputs* : Terlaksannya Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
- Outcomes* : Terwujudnya tenaga kerja trampil
- Benefit* : Terciptanya lapangan kerja
- Impact* : Mengurangi pengangguran
- 11) Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Jepang)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 357.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Pelatihan Dasar Pemagangan LUar Negeri (Jepang)
- Outcomes* : Terwujudnya calon tenaga kerja trampil
- Benefit* : Terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- Impact* : Tercapainya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing

- 12) Upgrading Pengelola Pelatihan
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 181.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Upgrading Pengelola Pelatihan
- Outcomes* : Terwujudnya Pengelola Pelatihan yang kompeten dan Profesional
- Benefit* : Terciptanya kapasitas dan kualitas SDM Pengelola Pelatihan yang kompeten
- Impact* : Tercapainya kualitas Pengelola Pelatihan yang berdaya saing
- 13) Upgrading Instruktur Pelatihan Kerja Swasta
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 181.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Upgrading Instruktur Pelatihan Kerja Swasta
- Outcomes* : Terwujudnya peningkatan kualitas Instruktur Pelatihan Kerja Swasta
- Benefit* : Terciptanya kualitas Instruktur Pelatihan Kerja Swasta di NTB yang kompeten dan profesional
- Impact* : Tercapainya kualitas tenaga kerja di NTB yang berdaya saing
- 14) Kajian Profil Potensi SDM NTB yang berkompeten
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 60.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Kajian Potensi SDM NTB yang berkompeten
- Outcomes* : Terwujudnya Data Profil SDM di Kabupaten/Kota
- Benefit* : Terciptanya pemuktahiran data Profil SDM di NTB
- Impact* : Tercapainya peningkatan kualitas informasi di NTB
- 15) Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi se NTB
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 181.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi se NTB
- Outcomes* : Terwujudnya Tenaga Kerja Trampil

Benefit : Terciptanya bukti pengakuan kompetensi kerja yang dikuasai

Impact : Tercapainya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

16) Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi

Inputs : APBD 2016 Rp. 99.900.000

Outputs : Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi

Outcomes : - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan Komputer
- Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan Menjahit

Benefit : Tersaringnya Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

Impact : Menghasilkan SDM yang produktif dan Berdayasaing

17) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 60.500.000

Outputs : Terlaksananya monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Outcomes : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Benefit : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Impact : Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1) Penyusunan Program

Inputs : APBD 2016 Rp. 177.710.000

Outputs : Terlaksananya Penyusunan Program Dinas

Outcomes : Tercapainya Penyusunan Program Dinas

Benefit : Tercapainya Perencanaan Kegiatan

- Impact* : Tercapainya Perencanaan Kegiatan sesuai dengan program
- 2) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 165.000.000
- Outputs* : Terlaksannya Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran
- Outcomes* : Tersedianya Data Kegiatan di UPT
- Benefit* : Terpenuhinya kebutuhan Bidang PKT di Kabupaten/UPT
- Impact* : Meningkatnya kesejahteraan transmigran
- 3) Monitorinog dan Evaluasi Program Pengembangan 60.500.000
- Outputs* : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Outcomes* : Tersedianya Laporan monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Benefit* : Terkendalinya kegiatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Impact* : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Kegiatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 4) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 214.500.000
- Outputs* : Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan KTM
- Outcomes* : Terwuudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan KTM
- Benefit* : Terberdayanya Masyarakat di Kawasan KTM
- Impact* : Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran pada khususnya dan masyarakat sekitar Kawasan KTM pada umumnya yang merata

- 5) Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 165.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
- Outcomes* : Terwujudnya taraf perekonomian masyarakat transmigran yang memadai
- Benefit* : Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar meningkat
- Impact* : Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar meningkat
- 6) Pengadaan Tanaman Komoditas Unggulan di UPT/Kawasan KTM
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 214.500.000
- Outputs* : Terlaksananya Pengadaan Tanaman Komoditas Unggulan di UPT/Kawasan KTM
- Outcomes* : Terwujudnya Hasil komoditas unggulan yang berdaya saing
- Benefit* : Bertambahnya pendapatan Transmigran
- Impact* : Meningkatnya kesejahteraan Transmigran
- 7) Bimtek/Sosialisasi Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan di UPT/Kawasan KTM
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 165.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan di UPT/KTM
- Outcomes* : Tersedianya laporan Bimtek/Sosialisasi
- Benefit* : Pendapatan warga Transmigran bertambah
- Impact* : Meningkatnya kesejahteraan Transmigran
- 8) Rehab Sarana Air Bersih (SAB) di UPT
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 209.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Rehab Sarana Air Bersih (SAB) di UPT

- Outcomes* : Terwujudnya kelancaran konsumsi air bersih di UPT
- Benefit* : Masyarakat Transmigran tidak kekurangan air bersih
- Impact* : Masyarakat transmigran sehat dan sejahtera
- 9) Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/Kawasan KTM
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 209.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/Kawasan KTM
- Outcomes* : Berfungsinya sarana dan prasarana dengan baik
- Benefit* : Mobilitas warga transmigran dan pemasaran hasil produksi menjadi mudah, terjangkau dan lancar
- Impact* : Meningkatnya aktivitas perekonomian dan kesejahteraan warga transmigran
- 10) Rehab Bangunan Fasilitas Umum di UPT/Kawasan KTM
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 192.500.000
- Outputs* : Terlaksananya Rehab Bangunan Fasilitas Umum di UPT/Kawasan KTM
- Outcomes* : Terwujudnya bangunan FU di UPT/KTM yang fungsional
- Benefit* : Terpakainya bangunan FU untuk aktivitas sosial di UPT
- Impact* : Meningkatnya aktivitas dan lembaga kemasyarakatan di UPT
- 11) Bimtek/Sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 154.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di UPT
- Outcomes* : Tersedianya laporan Bimtek/Sosialisasi
- Benefit* : Terwujudnya pemahaman dan partisipasi warga transmigran dalam menjaga dan memelihara Saprasi di UPT

Impact : Saprasi di UPT bias bertahan lama dan berfungsi untuk warga transmigran

12) Bantuan Peralatan Kesenian di UPT

Inputs : APBD 2016 Rp. 154.000.000

Outputs : Terlaksananya Pengadaan Bantuan Peralatan Kesenian di UPT

Outcomes : Tersedianya peralatan kesenian yang lengkap di UPT

Benefit : Terbentuknya Grup kesenian di UPT

Impact : Keterampilan dan bakat warga Transmigran dapat tersalurkan

13) Bimtek/Sosialisasi rujukan pasien di UPT

Inputs : APBD 2016 Rp. 88.000.000

Outputs : Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Rujukan Pasien di UPT

Outcomes : Tersedianya laporan Bimtek/Sosialisasi

Benefit : Mengurangi resiko terhadap pasien

Impact : Warga Transmigran dapat terselamatkan

9. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Inputs : APBD 2016 Rp. 183.420.875

Outputs : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja

Outcomes : Terwujudnya data base Informasi Ketenagakerjaan di Daerah

Benefit : Tersedianya Data sebagai bahan dasar stakeholder untuk menentukan kebijakan perencanaan ketenagakerjaan

Impact : Mengurangi pengangguran

2) Penanganan TKI Bermasalah

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 1.182.478.000
- Outputs* : Terlaksannya Penanganan TKI Bermasalah
- Outcomes* : TKI bermasalah dapat kembali ke tempat asalnya
- Benefit* : TKI Bermasalah dapat berkurang
- Impact* : TKI dapat berangkat kembali secara legal
- 3) Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 220.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Koordinasi MPU Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Outcomes* : Terwujudnya Koordinasi antara Anggota MPU Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Benefit* : Terciptanya solusi permasalahan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Impact* : Meningkatnya fungsi fasilitasi pemerintah dibidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- 4) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 385.000.000
- Outputs* : Terlaksananya LTSP
- Outcomes* : Terkendalinya pelayanan terhadap TKI/TKW
- Benefit* : Terkoordinirnya para TKI
- Impact* : Mengurangi percaloan dan TKI Ilegal
- 5) Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 42.900.000
- Outputs* : Terlaksannya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
- Outcomes* : Tersediannya Data Ketenagakerjaan
- Benefit* : Tersedianya data yang valid
- Impact* : Publik dan Para Pengambil Kebijakan dapat memperoleh data yang valid
- 6) Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 200.200.000

Outputs : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
Outcomes : Terkendalinya kegiatan dinas
Benefit : Terkendalinya kegiatan dinas
Impact : Terlaksananya kegiatan dinas

7) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Inputs : APBD 2016 Rp. 825.000.000
Outputs : Terlaksananya Koptrans
Outcomes : Terwujudnya Penyelenggaraan Transmigrasi yang lebih baik
Benefit : Penangan Penyelenggaraan Transmigrasi yang lebih baik
Impact : Menghasilkan Transmigran yang Produktif, berdayasaing dan lebih sejahtera

8) Peluang Kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN

Inputs : APBD 2016 Rp. 228.030.000
Outputs : Terlaksananya Peluang Kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN
Outcomes : Terwujudnya kesempatan kerja baik lokal maupun ke luar Provinsi NTB dan ke luar negeri
Benefit : Meningkatkan pendapatan tenaga kerja
Impact : Mengurangi pengangguran

9) Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Inputs : APBD 2016 Rp. 169.675.000
Outputs : Terlaksananya Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Outcomes : Terdatanya TKA secara tertib
Benefit : TKA dapat bekerja dengan aman dan lancar
Impact : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

10) Job Fair

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 220.000.000
- Outputs* : Terlaksananya Job Fair
- Outcomes* : Tercapainya Informasi yang tepat dan akurat
- Benefit* : Masyarakat dan para pengambil kebijakan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan
- Impact* : Peningkatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

10. Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi

1) Pendaftaran dan Seleksi

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 20.872.000
- Outputs* : Terlaksananya Pendaftaran Seleksi catrans
- Outcomes* : Terselenggaranya Pendaftaran Seleksi Catrans
- Benefit* : Masyarakat Catrans terdaftar dan terseleksi
- Impact* : Terwujudnya animo catrans

2) Penyusunan Profil UPT Bina

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 34.787.500
- Outputs* : Tersusunnya buku profil UPT Bina
- Outcomes* : Tersusunnya buku profil UPT Bina
- Benefit* : Mengetahui profil UPT Bina dan Perkembangannya
- Impact* : Teraksesnya informasi perkembangan UPT bina

3) Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)

- Inputs* : APBD 2016 Rp. 695.750.000
- Outputs* : Terlaksananya Koptrans
- Outcomes* : Terwujudnya Penyelenggaraan Transmigrasi yang lebih baik
- Benefit* : Penangan Penyelenggaraan Transmigrasi yang lebih baik
- Impact* : Menghasilkan Transmigran yang Produktif, berdayasaing dan lebih sejahtera

- 4) Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD)
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 69.575.000
- Outputs* : Terlaksannya Naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)
- Outcomes* : Terwujudnya Naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)
- Benefit* : Bertambahnya kuwota Penempatan Transmigran
- Impact* : Penanganan Masyarakat pra sejahtera dapat teratasi
- 5) Pelatihan Bahan Bangunan
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 110.388.905
- Outputs* : Terlaksannya Pelatihan Bahan Bangunan
- Outcomes* : Terwujudnya Transmigran yang trampil dan kompeten
- Benefit* : Bertambahnya pendapatan Transmigran
- Impact* : Meningkatkan kesejahteraan Transmigran
- 6) Monitoring dan Evaluasi
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 60.500.000
- Outputs* : Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi
- Outcomes* : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi
- Benefit* : Terkendalinya kegiatan Bidang Ketransmigrasian
- Impact* : Meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan
- 7) Bimtek Geographic Information System
- Inputs* : APBD 2016 Rp. 165.000.000
- Outputs* : Terlaksannya Bimtek Geographic Information System
- Outcomes* : Tersedianya laporan Bimtek GIS
- Benefit* : Terwujudnya data peta digital tentang daerah transmigrasi
- Impact* : Informasi tentang daerah Transmigrasi mudah diakses melalui informasi dan teknologi

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
 - Inputs* : APBD 2016 Rp. 137.500.000
 - Outputs* : Optimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi
 - Outcomes* : Meningkatnya Peran LKS Tripartit di Dalam Pemecahan Permasalahan Ketenagakerjaan
 - Benefit* : terselesaikannya Permasalahan Ketenagakerjaan
 - Impact* : terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis di Perusahaan

- 2) Survey kebutuhan hidup layak (KHL)
 - Inputs* : APBD 2016 Rp. 165.000.000
 - Outputs* : Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
 - Outcomes* : Terbitnya UMP
 - Benefit* : Terlindunginya Hak Tenaga Kerja
 - Impact* : Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja

- 3) Monitoring dan Evaluasi
 - Inputs* : APBD 2016 Rp. 60.500.000
 - Outputs* : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
 - Outcomes* : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi
 - Benefit* : Terkendalinya kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Impact* : Meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan

- 4) Pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
 - Inputs* : APBD 2016 Rp. 111.000.000
 - Outputs* : Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
 - Outcomes* : Terpahaminya persyaratan Norma Kerja oleh Pengusaha dan Pekerja
 - Benefit* : Terpenuhinya Persyaratan Norma Kerjadi Tempat Kerja

Impact : Terciptanya Ketenagakerjaan di tempat Kerja

5) Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 111.000.000

Outputs : Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Outcomes : Dipahaminya tentang kewajiban K3 di tempat kerja

Benefit : Terpenuhinya penanganan norma K3 di tempat kerja

Impact : Tercapainya kelalaian atau kecelakaan kerja nihil (zero accident)

6) Peningkatan SDM dan Kualitas Tenaga Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 114.284.500

Outputs : Terlaksananya pelatihan bagi paramedis

Outcomes : Meningkatkan kompetensi bagi paramedic perusahaan

Benefit : Tercapainya kemandirian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan

Impact : Meningkatkan upaya K3 di perusahaan

7) Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja

Inputs : APBD 2016 Rp. 79.860.000

Outputs : Terlaksananya pembinaan lingkungan social dan pengujian kesehatan kerja

Outcomes : Terwujudnya pembinaan lingkungan social dan pengujian kesehatan kerja

Benefit : Terpahaminya pembinaan lingkungan social dan terdeteksinya kesehatan para pekerja

Impact : Produktivitas tenaga kerja meningkat

BAB V
DANA INDIKATIF

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Tahun 2016	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans	Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Sekre tariat	
I.			1 14 1 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bln	30.250.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 2	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa fasilitas kantor	12 Bln	304.700.000	12 Bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 1 6	3 Penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas dan pemeliharaannya dapat berjalan baik	12 Bln	204.050.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 7	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	12 Bln	105.600.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 8	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	12 Bln	236.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 10	6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Terbelinya alat tulis kantor	12 Bln	86.350.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 11	7 Penyediaan Jasa Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan kantor Dinas	12 Bln	106.975.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 12	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana penerangan	12 Bln	55.000.000	12 Bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1 14 1 1 15	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi yang menunjang kegiatan dinas	12Bln	39.600.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 17	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makan dan minum kantor	12 Bln	71.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 18	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana-nya konsultasi dan koordiansi ke luar daerah	12 Bln	214.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 19	12	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pegawai non PNS	12 Bln	129.030.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 20	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksana-nya koordinasi ke dalam daerah	12 Bln	198.000.000	12 Bulan		
			1 14 1 1 21	14	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	12 Bln	77.000.000	12 Bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Sekretariat	
			1 14 1 2 3	1 Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksana-nya perencanaan pem-bangunan gedung	3 Pkt	190.300.000	3 Paket		
			1 14 1 2 13	2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksana-nya pengadaan laptop, AC, kipas angin, printer, UPS dan stavol, LCD proyektor, almari dan komputer	1 Pktt	507.650.000	1 Paket		
			1 14 1 2 22	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor	12 Bln	363.000.000	12 Bln		
			1 14 1 2 30	4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksana-nya pemeli-haraan secara rutin/berkala	12 Bln	60.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 2 38	5 Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Pemeliha-raan arsip	12 Bln	27.500.000	12 Bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Sekre tariat	
			1 14 1 3 1	1 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksana-nya pembinaan mental dan fisik Aparatur	1 Keg	33.000.000	1 Keg		
			1 14 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					Sekre tariat	
			1 14 1 5 1	1 Pelatihan dan Pendidikan Formal	Tersedianya biaya untuk mendukung pengembangan SDM	12 Bln	60.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 5 6	2 Pembinaan, Penegndalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	1 Keg	41.800.000	1 Keg		
			1 14 1 5 7	3 Penilaian kinerja SKPD	Terlaksananya penilaian kinerja SKPD	12 Bulan	68.200.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Sekre tariat	
			1 14 1 6 1	1 Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	142 Buku	82.500.000			
			1 14 1 6 3	2 Penyusunan pelaporan prognosis relaisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15 Buku	25.300.000			
			1 14 1 6 4	3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	37 Buku	24.750.000			
			1 14 1 6 5	4 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	40 Buku	79.200.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 6 8	5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	4 Kali	63.800.000			
			1 14 1 6 9	6 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (SIMNAKERTRANS)	12 Bulan	357.500.000	12 Bulan		
			1 14 1 7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah					Sekretariat	
			1 14 1 7 1	1 Peningkatan Manajemen Asset/Milik Daerah	Terlaksananya Peningkatan Asset /Barang Milik Negara	1 Keg.	79.750.000	1 Keg.		
			1 14 1 7 2	2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pembinaan Keuangan dan Stakeholder di lingkungan Disnakertrans	12 Bulan	79.750.000	12 Bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Bid. Pelatihan & Produk. Tenaga Kerja	
Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan	Tersedianya kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja		1 14 1 15 4	1 Mediasi Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi dan penempatan ketenagakerjaan	70 Orang	269.500.000	70 Orang		Prov.
	Tersedianya tenaga instruktur yang cukup		1 14 1 15 5	2 Sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	50 Orang	30.250.000	50 orang		Prov.
Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Tersedianya daerah / Negara penerima magang		1 14 1 15 13	3 Rekrutment dan seleksi pemagangan luar negeri (Jepang)	Terselenggaranya rekrutmen pemagangan luar negeri (Jepang)	200 Orang	104.967.500	200 Org		Prov.
	Tersedianya tenaga selector yang cukup		1 14 1 15 14	4 Sinkronisasi kebutuhan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Terselenggaranya program pelatihan berbasis kompetensi	10 Kab/ Kota	61.710.000	10 Kab/ Kota		Kab/ Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya sarpras yang cukup		1 14 1 15 15	5 Pembinaan dan Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Terselenggaranya pembinaan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	70 Orang	266.200.000	70 Orang		Kab/ /Kota
	Terlatihnya tenaga kerja		1 14 1 15 18	6 Monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan		Prov.
eningkatkan legalitas dan produktifitas tenaga kerja	Tersedianya pedoman yang baku		1 14 1 15 19	7 Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Terselenggaranya Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	25 Orang	121.000.000	25 Orang		Prov
	Tersedianya tenaga selector yang cukup		1 14 1 15 20	8 Pembentukan desa produktif	Terlaksananya pembentukan desa produktif	2 Desa	121.000.000	10 Desa		Kab/ Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya serpras yang cukup dan memadai		1 14 1 15 21	9 Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition (5 kejuruan=50 Orang)	Terlaksananya Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition	50 Orang	319.000.000	50 Orang		Prov.
			1 14 1 15 22	10 Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)	Terlaksananya Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)	10 Lembaga	27.500.000	10 Lbg		Prov.
			1 14 1 15 23	11 Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	200 Orang	715.000.000	200 Org		Prov.
			1 14 1 15 24	12 Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemaganagn Luar Negeri (Jepang)	100 rang	357.500.000	500 Org		Prov
			1 14 1 15 25	13 Upgrading pengelola pelatihan	Terlaksananya Upgrading pengelola pelatihan	25 Orang	181.500.000	125 Org		Prov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 15 26	14 Upgrading instruktur lembaga pelatihan	Terlaksananya upgrading instruktur lembaga pelatihan	50 orang	181.500.000	250 Org		Prov.
			1 14 1 15 27	15 Kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten	Terlaksananya kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten	25 Buku	60.500.000	25 Buku		Prov.
			1 14 1 15 28	16 Sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB	10 Kab/Kota	181.500.000	10 Kab/Kota		Prov.
				17 Pelatihan Berbasis Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	Provinsi	99.900.000	Porvinsi	BLK Mataram	
			1 14 1 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					Bid. Pengembangan Kawas an Trans migrasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat	Tersedianya pedoman sesuai kebutuhan		1 14 1 15 1	1 Perencanaan dan Penyusunan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tersusunnya program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	25 Buku	177.710.500			Prov.
	Tersedianya Transmigran yang berkualitas dan trampil		1 14 1 15 4	2 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran	5 UPT	165.000.000	5 UPT		UPT Bina
Peningkatan efektifitas pengembangan usaha dan kawasan transmigrasi	Tersedianya tanaman komoditas unggulan yang cukup		1 14 1 15 5	3 Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	6 Kali	60.500.000	6 kali		Prov
	Tersedianya lembaga keuangan dikawasan transmigrasi		1 14 1 15 6	4 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan KTM	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasn KTM	2 KTM	214.500.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang cukup		1 14 1 15 7	5 Pendampingan pengembangan usaha ekonomi di KTM	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi di KTM	2 KTM	165.000.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka
	Tersedianya peralatan kesenian yang cukup		1 14 1 15 8	6 Pengadaan tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya pengadaan tanamn komoditas unggulan di KTM	2 KTM	214.500.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka
			1 14 1 15 9	7 Bimtek/sosialisasi pengembangan tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya Bimtek pengembangan tanaman komoditas unggulan di UPT	5 UPT	165.000.000	5 UPT		UPT di P. Lombok & P. Sumbawa
			1 14 1 15 10	8 Rehab sarana air bersih (SAB) di UP	Terlaksananya Rehab SAB di UPT	5 UPT	209.000.000	5 UPT		UPT di P. Lom bok & P. Sumbawa
			1 14 1 15 11	9 Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/kawasan KTM	5 UPT Bina & 2 KTM	209.000.000	5 UPT Bina & 2 KTM		UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa, KTM Tambora & Labangka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 14 1 15 12	10 Rehab bangunan fasilitas umum di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya rehab bangunan Fasum di UPT/KTM	5 UPT Bina & 2 KTM	192.500.000	5 UPT Bina & 2 KTM		UPT Bina di P. Lombok & P. Sum bawa, KTM Tambora & Labangka
			1 14 1 15 13	11 Bimtek/sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT	Terlaksananya Bimtek/sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT	5 UPT	165.000.000	5 UPT		UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa
			1 14 1 15 14	12 Bantuan peralatan kesenian di UPT/	Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kesenian di UPT	5 UPT	154.000.000	5 UPT		UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa
			1 14 1 15 15	13 Bimtek/sosialisasi rujukan pasien di UPT	Terlaksananya Bimtek/sosialisasi rujukan pasien di UPT	5 UPT	88.000.000	5 UPT		UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa
Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja	Tersedianya data base ketenagakerjaan		1 14 1 16	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja					Bid. Penempatan dan Perluasan Kerja	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersalurnya tenaga kerja		1 14 1 16 1	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	20 Buku	183.420.875	20 Buku		Prov.
	Terwujudnya layanan terpadu satu pintu (LTSP)		1 14 1 16 4	2 Penanganan TKI Bermasalah	Terlaksananya penanganan TKI Bermasalah	1500 Orang	1.182.478.000			Prov.
	Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD, AKAN		1 14 1 16 5	3 Mitra Praja Utama (MPU) Bid. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian	Terlaksananya koordinasi MPU (MPU) Bid. Nakertrans	1 Keg.	220.000.000	1 Keg.		Prov.
	Tertanganinya TKI Bermasalah		1 14 1 16 6	4 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Terlaksananya LTSP	12 Bulan	385.000.000	12 Bulan		Prov.
Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas pembinaan tenaga kerja mandiri	Tersedianya tenaga Pembina yang terampil		1 14 1 16 9	5 Penyusun Profil Ketenagakerjaan	Tersusunnya Buku Profil Ketenagakerjaan	20 Buku	42.900.000	20 Busku		Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersedianya pedoman sesuai kebutuhan		1 14 1 16 11	6 Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian	Terlaksananya rapat koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	1 Keg	200.200.000	1 Keg		Provinsi
Meningkatkan efektifitas dan kuantitas penerapan teknologi tepat guna dan padat karya	Tersedianya teknologi tepat guna dan padat karya produktif		1 14 1 16 14	7 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Terlaksananya koordinasi ketenagakerjaan	1 Keg	825.000.000	1 Keg		Luar Provinsi NTB, LN
			1 14 1 16 15	8 Peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	Orang	228.030.000			Prov. Kalimantan dan Sumatra
			1 14 1 16 17	9 Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Terlaksananya sosialisasi IMTA	Orang	169.675.000			Provi
			1 14 1 16 18	10 Job Fair	Terlaksananya Job Fair	Orang	220.000.000			Provi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kualitas dan kuantitas areal dan permukiman transmigran	Tersedianya areal permukiman yang memadai		1 14 1 16	Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi					Bid. Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi	
	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai		1 14 1 16 1	1 Pendaftaran dan seleksi	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon transmigran	1 Keg	20.872.500			Kab/Kota se P. Lombok
Meningkatkan aksesibilitas perpindahan dan penempatan	Tersedianya naskah kerja sama antar daerah (NKSAD)		1 14 1 16 2	2 Penyusunan Profil UPT Bina	Tersusunnya Buku Profil UPT Bina	5 UPT	34.787.500	5 UPT		Prov
	Terkirimnya transmigran secara lancar		1 14 1 16 3	3 Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya KOPTRANS	1 Keg	695.750.000	1 Keg		Prov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Efektifitas publikasi dan kemitraan	Tersedianya bahan publikasi yang cukup		1 14 1 16 4	4 Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD)	Tersusunnya NKSAD	1 Keg	69.575.000	1 Keg		Prov
	Tersedianya prasarana penunjang yang memadai		1 14 1 16 6	5 Pelatihan Bahan Bangunan	Terlaksananya Pelatihan Bahan Bangunan	30 Orang	110.388.905	30 Orang		Prov
	Tersedianya profil UPT Bina yang tepat		1 14 1 16 5	6 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monev	6 kali	60.500.000	6 kali		Prov
			1 14 1 16 8	7 Bimtek Geographic Information System	Tersedianya Data Pemetaan Daerah Transmigrasi	1 Keg	165.000.000	1 Keg		Prov
Meningkatkan sinergitas antara pengusaha dengan tenaga kerja	Terlaksananya optimalisasi fungsi LKS tripartite dan dewan pengupahan		1 14 1 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Bid. Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terpenuhinya hak serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya		1 14 1 17 5	1 Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Optimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi	10 Lbg	137.500.000	10 Lbg		Kab /Kota
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Terlaksananya norma ketenagakerjaan di perusahaan		1 14 1 17 13	2 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 Kab/ Kota	165.000.000	10 Kab/ Kota		Kab /Kota
	Terlaksananya norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan		1 14 1 17 16	3 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monev	6 Kali	60.500.000	6 kali		Prov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan aksesibilitas pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			1 14 1 17 17	4 Pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	20 prshn	111.000.000	20 prshn		Provi
				5 Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20 prshn	111.000.000	20 prshn		
			1 14 1 17 17	5 Peningkatan SDM dan Kualitas Tenaga Kerja	Terlaksananya pelatihan bagi paramedis	33 orang	114.284.500	33 Orang		Provi
			1 14 1 17 11	5 Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan dan Pengujian Kesehatan Kerja	200 orang (4 Kegiatan) dan 2000 sasaran pengujian kesehatan	79.860.000	200 orang (4 Kegiatan) dan 2000 sasaran pengujian kesehatan		Provi

BAB VI SUMBER DANA

Sumber dana untuk mendukung Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Dekonsentrasi sebanyak 6 (enam) Program :
 - ✓ Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - ✓ Program Penempatan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - ✓ Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - ✓ Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Dana Tugas Pembantuan sebanyak 3 (tiga) Program :
 - ✓ Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)
 - ✓ Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)
 - ✓ Program Penempatan, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
3. Dana APBD Provinsi NTB terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebanyak 10 (sepuluh) Program :
 - ✓ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - ✓ Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - ✓ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - ✓ Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - ✓ Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi
 - ✓ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - ✓ Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - ✓ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah disusun untuk masa 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2016 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat .

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016.

Mataram, Januari 2015
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Drs. H. WILDAN
NIP. 19581231 18303 1 340